

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN ANGGARAN 2007

I KETUT BUDIARTHA

ABSTRACT

With the end of year budget 2007, the government has succeeded to arrange the Report of Government Budget (LKPP). The report consists of the Report of Budget Realization, the Report of Cash flow, and the Government Balance Sheet. These reports have been audited by Indonesian Supreme Audit Agency and it has been rewarded an opinion of "denying to give opinion (disclaimer)". The same opinion has been given by the institution since 2004. By publishing the reports, then the society will be able to judge the ability of government in managing the previous period of budget and also to predict for the future budget. The technique to analyze the LKPP is general financial analysis which is used to evaluate the management of private sector such as (1) comparative financial statement analysis, (2) common-size financial statement analysis, (3) ratios analysis, (4) cash flow analysis, and (5) valuation.

According to comparative analysis there is a surplus budget of last year development and it is positive from 273.914.695,00 rupiah into minus 7.387.288.768 rupiah. For the wealth of country 1.600.211.672.865.020,00 rupiah and actually it is expensed from the debt 1.430.965.464.059.560.00, and the rest is taken from the country fund 169.246.208.805.469,00

The biggest contribution of the country income is taken from taxes for 69,37% and the rest for 30,39% is non-taxes income. The country income is, then, used as government finance for 67%, being transfer to local government for 33% and for the fund of particular autonomy and its adjustment for 4%.

Based on financial ratio analysis, the actual current ratio for 2007 is 112%, meanwhile in the year of 2006 is 117%. There is a reduction for 5%. For the debt ratio to modal in the year 2007 is 845%, it means every 1 rupiah of personal modal will be responsible for the debt of 845 rupiah. This condition shows the quantity of government asset 1.600.211.672.865.020,00 rupiah and it is taken 84,5% from the debt.

Key words: *The Report of Government Financial, the Report of Financial Realization, the report of financial cash flow, government balance sheet, disclaimer opinion*

Unsur-unsur LKPP

Sejalan dengan reformasi di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, maka sebagai wujud nyatanya, berhasil diterbitkan laporan keuangan dan telah dipublikasikan melalui media masa nasional. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca Pemerintah untuk tahun anggaran 2007. Dengan dipublikasikannya laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas kemampuan keuangan negara yang meliputi penerimaan negara yang terbagi ke dalam penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan pajak perdagangan internasional, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Untuk belanja negara meliputi belanja pemerintah

pusat dan transfer untuk daerah dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SILKA). Dari neraca pemerintah pusat dapat diketahui total aset pemerintah, total utang dan total ekuitas dana. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2007 telah dipublikasikan dalam harian Kompas tanggal 16 Juli 2007 dan website BPKRI.

Dengan dipublikasikannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masyarakat umum dapat menilai kinerja keuangan pemerintah walaupun hasil audit BPKRI masih menyatakan pendapat "**tidak menyatakan pendapat (disclaimer)**" atas laporan tersebut, sama seperti tahun-tahun sebelumnya artinya tidak ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dalam analisis atas LKPP ini akan digunakan pandangan secara umum atas laporan keuangan dan beberapa rasio keuangan yang sering digunakan

untuk melakukan analisis atas laporan keuangan sektor swasta.

Mengacu pada PP. Nomor 24 Tahun 2005, sebagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap DPR maka pada akhir tahun anggaran pemerintah menerbitkan laporan keuangan yang terdiri dari: Realisasi APBN, Laporan Arus Kas, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Dalam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan ini sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sbb: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, asset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a) informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, c) informasi tentang dasar penyusunan laporan dan informasi lainnya yang bersifat makro yang mempengaruhi pencapaian target. Selain informasi secara makro dalam catatan atas laporan keuangan juga disampaikan tentang penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi.

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan opini yang diberikan adalah "Menolak Memberikan Pendapat (*disclaimer*)". Dengan

opini seperti ini berarti BPK mengalami kesulitan untuk menerapkan prosedur dan standar pemeriksaan yang ada. Sama seperti LKPP tahun anggaran 2006, BPK juga memberikan opini "Menolak Memberikan Pendapat (*disclaimer*)". Alasan yang dikemukakan oleh Ketua BPK RI adalah pada sistem akuntansi yang ditetapkan dan diselenggarakan pemerintah, rekonsiliasi realisasi anggaran belum efektif. Sistem aplikasi teknologi informasi yang digunakan pemerintah juga tidak terintegrasi. Akibatnya, angka penerimaan pajak yang dicatat oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara, misalnya berbeda dengan yang dilaporkan dalam sistem monitoring pembayaran dan pelaporan pajak oleh Ditjen. Pajak. Pemerintah juga belum menerapkan sistem perbendaharaan tunggal sehingga rekening-rekening pemerintah tidak terkendali dan dimiliki atas nama lebih dari 1.000 individu pejabat negara. Pola penerimaan dan pengeluaran negara di luar mekanisme APBN yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan rawan kontrol terus terjadi. Pemerintah menerapkan standar ganda atas mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ditjen Pajak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan dana terutama yang terkait dengan pembayaran kembali pajak yang telah dipungut sebelumnya (restitusi), di satu sisi uang SPP mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, harus masuk APBN. Demikian disampaikan oleh Ketua BPK kepada DPR RI saat menyerahkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2006 yang dikutip oleh Kompas tanggal 20 Juli 2007. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan LKPP tahun anggaran 2007, sehingga BPK kembali memberikan opini Menolak Memberikan Pendapat (*disclaimer*).

Asumsi Dasar LKPP

Seperti halnya dengan akuntansi untuk sektor privat, akuntansi sektor publik juga harus berpedoman pada asumsi-asumsi yang sudah diterima secara umum dan kebenarannya tidak perlu diuji kembali. Asumsi yang pertama adalah asumsi kemandirian entitas. Asumsi ini mengasumsikan bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya den-

gan tanggungjawab penuh. Asumsi yang kedua adalah kesinambungan usaha. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Asumsi yang ketiga adalah keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dalam satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Berbeda halnya dengan akuntansi untuk sektor privat, akuntansi sektor publik tidak memasukkan basis akuntansi sebagai asumsi dasar, akan tetapi memasukkan sebagai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Potret LKPP Tahun Anggaran 2007

Seperti dipublikasikan dalam harian Kompas tanggal 16 Juli 2008, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani) telah mempublikasikan LKPP untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2007. Adapun yang dipublikasikan adalah: Laporan Realisasi APBN, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk yang dilaporkan dalam LKPP adalah kegiatan lembaga Negara, kementerian dan departemen yang menggunakan APBN. Dalam LKPP ini tidak termasuk Bank Indonesia, BUMN, pemerintah daerah yang mengacu pada APBD dan BUMD.

Laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2007 sebagai laporan yang menunjukkan kegiatan pemerintah selama setahun menunjukkan realisasi pendapatan Negara mencapai Rp 707.806.088.304.925 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp 694.087.881.512.000, realisasinya 101,98% dari yang dianggarkan. Penerimaan negara yang menyebabkan terjadinya kenaikan sebesar 1,98% adalah penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak yang dianggarkan sebesar Rp 198.253.670.829.000 sedangkan realisasinya adalah Rp 215.119.705.411.332. Untuk belanja Negara realisasinya mencapai Rp 757.849.912.890.878 sedangkan yang dianggar-

kan sebesar Rp 752.373.176.788.000, realisasinya 100,70%. Akibat belanja negara lebih besar dari pendapatan negara maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 49.843824.585.953. Setelah ditutupi dengan pembiayaan sebesar Rp 42.456.535.817.769, masih menyisakan sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA) sebesar Rp 7.387.288.768.184. Penyebab terbesar dari defisitnya realisasi anggaran tahun 2007 adalah realisasi subsidi melonjak menjadi Rp 150.214.443.691.269 dari yang dianggarkan sebesar Rp 105.073.369.472.000 atau realisasinya 142%. Dari analisis tersebut dapat dilihat ternyata untuk membiayai belanja sehari-hari saja Negara kita masih mengandalkan utang. Timbul pertanyaan “apakah tidak mungkin APBN dibiayai dari utang”? Dilihat dari tambahan utang tahun 2007 sebesar Rp 100 triliun dibandingkan dengan pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp 197 triliun, maka kualitas pengelolaan keuangan Negara sudah cukup baik, karena penambahan utang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pokok dan bunga.

Laporan arus kas sebagai laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar uang negara ternyata menyisakan uang negara per 31 Desember 2007 sebesar Rp 29.434.099.501.748. Dari laporan arus kas ini dapat dilihat bahwa beban pemerintah untuk membayar pokok utang (dalam dan luar negeri) cukup besar yaitu Rp 117.608.522.699.772,00, bunganya sendiri sebesar Rp 79.744.341.931.244. Secara total pembayaran pokok dan bunga utang Negara mencapai Rp 197.352.864.631.016,00 atau sebesar 27,88% dari realisasi pendapatan negara. Untuk daerah yang memperoleh otonomi khusus memperoleh kucuran dana sebesar Rp 4.058.348.000.000. Terjadi peningkatan sebesar Rp 570.064.000.000,00 dari realisasi tahun 2006.

Neraca sebagai laporan yang menunjukkan posisi kekayaan/aset, utang/kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2007 menunjukkan jumlah aset pemerintah berjumlah Rp 1.600.211.672.865.025. Kewajiban pemerintah berjumlah Rp 1.430.965.464.059.556 dan ekuitas dana sebesar Rp 169.246.208.805.469. Berdasarkan angka-angka tersebut dapat dilihat bahwa 89,24% dari total aset yang dimiliki pemerintah dibiayai/bersumber dari kewajiban/utang baik kewajiban/utang jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan yang bersumber dari pembiayaan sendiri hanya sebesar 10,76%. Jika komposisi pembiayaan aset pemerintah dikaitkan dengan en-

titas swasta/private maka entitas swasta/perusahaan tersebut sudah bisa dikategorikan bangkrut/vailit (LKPP 2007 terlampir).

Analisis LKPP

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terkandung dalam laporan keuangan suatu instansi, maka perlu dilakukan analisis. Dengan melakukan analisis akan diketahui kontribusi dan sumbangan masing-masing komposisi perkiraan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (2003), beberapa teknik yang sering digunakan yaitu: (1) *comparative financial statement analysis*, (2) *common-size financial statement analysis*, (3) *ratios analysis*, (4) *cash flow analysis and* (5) *valuation*.

1. *Comparative financial statement analysis*

Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mereview neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan membandingkan antar periode akan diketahui perubahan pada setiap rekening dan akan diketahui trend/kecendrungan yang terjadi apakah terjadi kecendrungan menurun atau meningkat. Untuk analisis perbandingan, LKPP tahun 2007 akan dibandingkan dengan LKPP tahun 2006. Analisis perbandingan secara umum dapat dijelaskan sbb: total penerimaan negara mengalami peningkatan sebesar Rp 56.100.745.004.944, dari tahun 2006. Peningkatan terbesar disumbangkan oleh penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 81.785.615.619, sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan hibah mengalami penurunan masing-masing Rp13.664.411.760 dan Rp136.302.846.

Untuk belanja negara mengalami peningkatan sebesar Rp 90.521.100.826 yang terbagi ke dalam belanja pemerintah pusat meningkat sebesar Rp 64.591.180.016 transfer untuk daerah meningkat sebesar Rp 27.083.223.758 dan dana otonomi khusus dan penyesuaian meningkat sebesar Rp 5.246.668.489.

Untuk pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp 13.040.945.565, yang terbagi ke dalam pembiayaan dalam negeri meningkat sebesar Rp13.884.845.060 dan pembiayaan luar negeri meningkat sebesar Rp(843.899.495). Dengan terjadinya peningkatan pendapatan negara dan hibah yang disertai dengan peningkatan belanja negara dan pembiayaan maka sisa lebih/kurang anggaran

yang sebelumnya positif sebesar Rp 273.914.695,00 menjadi minus Rp 7.387.288.768. Berdasarkan analisis perbandingan atas laporan realisasi anggaran ternyata peningkatan penerimaan negara diiringi oleh peningkatan belanja negara dan pembiayaan yang lebih besar sehingga sisa anggaran yang sebelumnya positif, tahun 2007 menjadi negatif.

Perbandingan neraca dapat dibandingkan sbb: jumlah aset tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp 380.247.115.553.205,00 yang terbagi ke dalam aset lancar sebesar Rp 30.614.570.964.384,00, investasi jangka panjang meningkat sebesar Rp 27.791.360.065.740,00 aset tetap meningkat sebesar Rp 99.561.017.136.378,00 dan aset lainnya meningkat sebesar Rp 222.280.167.386.703,00.

Berdasarkan analisis jumlah aset ternyata peningkatan terbesar disebabkan oleh aset lainnya. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dana yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain. Peningkatan jumlah aset lainnya sebesar Rp 222 triliun, peningkatan terbesar disumbangkan oleh aset lain-lain yaitu sebesar Rp 229.073.080.383.584,00. Peningkatan jumlah aset lain-lain sebesar Rp 229 triliun menunjukkan jumlah yang cukup material dan aset sejumlah itu merupakan aset pemerintah yang tidak jelas, apakah tergolong sebagai aset berwujud atau tidak berwujud.

Untuk kelompok kewajiban dan ekuitas dana perubahannya dapat diuraikan sbb: secara keseluruhan jumlahnya mengalami kenaikan sebesar Rp 380.247.115.553.204,00 dari tahun 2006. Kenaikan sejumlah tersebut disebabkan oleh kenaikan utang jangka pendek sebesar Rp 31.591.361.816.178,00, kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp 69.311.031.098.719,00 dan sisanya kenaikan ekuitas dana neto sebesar Rp 279.344.722.638.307,00. Secara total jumlah utang pemerintah adalah sebesar Rp 1.430.965.464.059.560,00. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 139.732.332.373.059,00 dan utang jangka panjang sebesar Rp 1.291.233.131.686.500,00 Utang sebesar tersebut jika dihubungkan dengan jumlah penduduk Indonesia lebih/kurang 200.000.000 jiwa, maka setiap kepala penduduk Indonesia akan menanggung beban utang sebesar Rp 7.154.827,32. Dengan jumlah utang sebesar itu maka tidak mengherankan jika ada humor yang mengatakan bahwa anak cucu kita ikut menanggung utang dan jika dihubungkan

dengan pendapatan negara dan hibah jumlahnya dua kali pendapatan negara.

2. *Common-size financial statement analysis.*

Melalui analisis ini akan diketahui kontribusi setiap rekening terhadap laporan secara menyeluruh. Seperti contohnya dalam melakukan analisis atas neraca, maka total asset adalah 100% atau total utang dan modal adalah 100%. Selanjutnya rekening-rekening yang satu kelompok dicari prosentase kontribusinya terhadap total aset atau pasiva. Berdasarkan analisis tersebut akan diketahui rekening mana yang memberikan kontribusi maksimum dan rekening mana yang memberikan kontribusi minimum. Dengan komposisi seperti ini diperlukan perencanaan dan pengendalian yang berbeda sesuai dengan kontribusinya terhadap total aset atau pasiva.

Analisis atas Laporan Realisasi APBN menunjukkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 707.806.088.302,00. Dari jumlah tersebut penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 490.988.634.954 atau 69,37%, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 215.119.705.409 atau 30,39%, dan penerimaan dari hibah sebesar Rp 1.697.747.939 atau sebesar 0,2%.

Penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri Rp 470.051.815.733 atau sebesar 96% dari total penerimaan pajak, dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 20.936.819.221 atau sebesar 4% dari total penerimaan pajak. Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam sebesar Rp 132.892.588.952 atau sebesar 62% dari penerimaan negara bukan pajak, bagian penerimaan atas laba BUMN sebesar Rp 23.222.505.531 atau sebesar 11% dan penerimaan negara bukan pajak lainnya sebesar Rp 59.004.610.926 atau sebesar 27%.

Berdasarkan analisis pendapatan negara tersebut ternyata penerimaan pajak memberikan sumbangan terbesar dalam pendapatan negara (69,37%). Hal ini berarti penerimaan negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan penerimaan sejumlah tersebut maka Dirjen Pajak menjadi tumpuan pemerintah untuk menggali segala sumber yang ada. Tidak menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak semakin lama jumlah dan proporsinya/prosentasenya semakin lama semakin meningkat karena disinyalir bahwa masih banyak Wajib Pajak belum

melaporkan seratus persen (100%) kewajiban pajaknya disamping memang banyak penduduk yang seharusnya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi belum mengurus NPWP.

Dari segi belanja negara, total belanja Negara mencapai Rp 757.649.912.886. Jumlah tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 504.623.263.583 atau sebesar 67%, dan transfer untuk daerah sebesar Rp 253.263.178.085 atau sebesar 33%. Belanja pemerintah pusat selanjutnya didistribusikan untuk: belanja pegawai sebesar Rp 90.424.946.964 atau sebesar 18%,

belanja barang Rp 54.511.365.469 atau sebesar 11%, belanja modal Rp 64.288.669.050 atau sebesar 13%, pembayaran bunga utang Rp 79.806.377.534 atau sebesar 16%, subsidi Rp 150.214.443.691 atau sebesar 30%, bantuan sosial Rp 49.756.281.449 atau sebesar 10% dan belanja lain-lain Rp 15.621.179.426 atau sebesar 3% dari belanja pemerintah pusat.

Transfer untuk daerah sebesar Rp 253.263.178.085 selanjutnya digunakan untuk dana perimbangan sebesar Rp 243.967.173.165 atau sebesar 96%, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 9.296.004.920 atau sebesar 4%. Dana perimbangan selanjutnya digunakan untuk dana bagi hasil Rp 62.941.953.784 atau sebesar 26%, dana alokasi umum Rp 164.787.399.928 atau sebesar 68% dan dana alokasi khusus Rp 16.237.819.453 atau sebesar 6% dari dana perimbangan. Dana otonomi khusus sebesar Rp 9.296.004.920 selanjutnya digunakan untuk dana otonomi khusus sebesar Rp 4.045.748.000 atau sebesar 44% dan dana penyesuaian sebesar Rp 5.250.256.920 atau sebesar 56%.

Berdasarkan analisis belanja negara ternyata 67% digunakan untuk pemerintah pusat dan sisanya untuk daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah pusat masih sangat dominan. Pengeluaran pemerintah pusat yang paling besar adalah untuk subsidi. Subsidi ini terutama digunakan untuk minyak tanah, premium, solar, bantuan tunai langsung dan dengan sendirinya akan dinikmati oleh daerah yang jumlah penduduknya paling banyak. Untuk pembayaran bunga utang jumlahnya mencapai Rp 79.806.377.534 atau sebesar 16%, jumlah tersebut hanya untuk pembayaran bunganya saja. Untuk pembayaran pokok utang luar negeri mencapai Rp 57.922.459.152. Jika pembayaran pokok dan bunganya dijumlah akan mencapai Rp 137.728.836.686. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari belanja pegawai dan jika tidak ada

pembayaran bunga utang maka dipastikan Realisasi APBN tahun 2007 tidak mengalami defisit sebesar Rp 49.843.824.584.

(3) Ratios analysis.

Analisis rasio merupakan teknik dan cara yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam melakukan analisis atas laporan keuangan. Analisis rasio ini lebih banyak mengungkapkan hasil berupa matematika, sedangkan interpretasinya lebih kompleks dan mempunyai banyak makna. Agar lebih bermakna maka rasio-rasio tersebut harus mengacu kepada pentingnya hubungan secara ekonomi. Seperti contohnya terdapat hubungan langsung antara harga jual dengan harga pokok. Dengan demikian rasio harga pokok penjualan terhadap penjualan adalah sangat penting. Beberapa analisis rasio yang sering digunakan adalah: (a) *credit (risk) analysis* yang meliputi *liquidity ratios* dan *capital structure and solvency*, (b) *profitability analysis* meliputi: *return on investment*, *operating performance* dan *asset utilization*

Dalam analisis rasio atas LKPP tidak menggunakan seluruh rasio, karena rasio-rasio yang dikemukakan sebelumnya lebih tepat jika digunakan untuk sektor swasta yang berorientasi laba. Tidak digunakannya beberapa rasio untuk pemerintah, karena sifatnya yang melayani publik dan tidak berorientasi laba. Adapun rasio-rasio yang akan digunakan adalah *current ratio* dan *total debt to equity*

Berdasarkan tabel tersebut besarnya *current ratio* pemerintah untuk tahun 2007 sebesar 112% artinya setiap Rp 1 utang lancar pemerintah ditanggung oleh Rp 1,12 aktiva lancar. Dibandingkan dengan tahun 2006, rasio ini mengalami penurunan sebesar 5%. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan aktiva lancar lebih kecil

dibandingkan dengan utang lancar yaitu 24% untuk kenaikan aktiva lancar dan 29% untuk utang lancar. Secara teoritis rasio yang baik adalah dua (2) berbanding satu (1) artinya setiap 2 rupiah aktiva lancar menanggung 1 rupiah utang lancar.

Total utang terhadap total modal menunjukkan hasil 845% artinya setiap Rp 1 ekuitas dana pemerintah menanggung utang sebesar Rp 845. Jika dibandingkan dengan sektor swasta kondisi ini sudah bisa dikategorikan bangkrut. Kondisi tahun 2007 masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 karena perbandingannya -1208%. Terjadinya minus total utang terhadap total ekuitas dana disebabkan karena total dana yang ditempatkan dalam dana investasi yang berupa investasi jangka panjang, investasi dana aset tetap dan investasi aset lainnya secara total lebih kecil dibandingkan dengan utang jangka panjang. Dengan kata lain aset yang ada selain aset lancar tidak mampu untuk membayar utang jangka panjang, dalam tahun 2006 minus sebesar Rp 110.098.513.832.838,00, sedangkan untuk tahun 2007 positif sebesar Rp 169.246.208.805.469,00. Dengan terjadi perubahan dari minus Rp 110 triliun menjadi positif Rp 169 triliun, berarti terjadi kenaikan positif sebesar Rp 279 triliun, merupakan angka sangat signifikan, sehingga muncul pertanyaan apakah angka-angka yang dicantumkan dalam neraca tingkat akurasi sudah memadai?

(4) Cash Flow analysis.

Analisis aliran kas terutama digunakan untuk menilai sumber dan penggunaan dana yang terjadi pada institusi selama periode tertentu. Analisis aliran kas memberikan suatu pandangan tentang bagaimana institusi memperoleh pendanaannya dan cara menggunakannya dalam bentuk sumberdaya. Dengan analisis aliran kas dapat diketahui seberapa besar sumber kas yang berasal dari kegiatan operasi, seberapa besar yang berasal dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Tidak banyak analisis yang bisa dilakukan atas Laporan Arus Kas, karena laporan ini tidak jauh berbeda dengan Laporan Realisasi Anggaran. Analisis atas Laporan Arus Kas sudah dibahas secara mendetail dalam Analisis Laporan Realisasi Anggaran. Yang bisa dilihat dari Laporan Arus Kas adalah saldo kas pemerintah per 31 Desember 2007 berjumlah Rp 29.434.099.501.748,00 yang terdiri dari: kas di BUN & KPPN dan Kas BLU sebesar Rp 24.062.415.000.056,00, rekening pemerintah di BI

Keterangan	2007	2006
Current ratio		
Current asset = $\frac{156,599,727,674,012.00}{139,732,332,373,059.00}$	112%	
Current liabilities		
Current asset = $\frac{125,985,156,709,628.00}{108,140,970,556,881.00}$		117%
Current liabilities		
Total debt to total equity		
Total Liabilities = $\frac{1,430,965,464,059,560.00}{169,246,208,805,469.00}$	845%	
Shareholders equity		
Total Liabilities = $\frac{1,330,063,071,144,660.00}{(110,098,513,832,838.00)}$		-1208%
Shareholders equity		

sebesar Rp 3.248.408.392.480,00, kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 1.245.221.273.097,00 dan kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 878.054.836.115,00.

(5) Valuation.

Penilaian merupakan proses yang sangat penting dari berbagai jenis usaha dan analisis laporan keuangan. Penilaian umumnya mengacu pada estimasi nilai intrinsik atau nilai saham suatu perusahaan. Dasar penilaiannya menggunakan teori present value. Teori ini menetapkan nilai dari utang atau modal adalah setara dengan jumlah seluruh penerimaan dari modal yang di-discounted ke nilai sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Teori present value menggunakan konsep *time value of money* yang menetapkan nilai waktu sekarang lebih besar dibandingkan dengan yang akan datang.

Mengingat analisis laporan keuangan dengan melakukan penilaian atas nilai instrinsik dan nilai buku dari saham suatu entitas, maka analisis ini tidak bisa diterapkan mengingat ekuitas yang dimiliki pemerintah berbeda dengan ekuitas yang ada pada perusahaan swasta.

Simpulan

Upayan pemerintah untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan negara khususnya di bidang keuangan negara telah berhasil dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari telah diterbitkannya dan dipublikasikannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sejak beberapa tahun terakhir, walaupun menurut hasil audit yang dilakukan, BPKRI masih memberikan pendapat "tidak memberikan pendapat". Artinya masih ada praktek keuangan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan peraturan-peraturan yang ada.

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk tahun 2007 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca Pemerintah. Termasuk dalam laporan-laporan tersebut adalah kegiatan lembaga Negara, kementerian dan departemen yang menggunakan APBN. Dalam LKPP ini tidak termasuk Bank Indonesia, BUMN, pemerintah daerah yang mengacu pada APBD dan BUMD.

Analisis terhadap penerimaan negara mengalami peningkatan sebesar Rp 56.100.745.004.944, dari tahun 2006 sedangkan belanja negara mengalami peningkatan sebesar Rp 90.521.100.826.

Perbandingan neraca dapat menunjukkan jumlah aset tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp 380.247.115.553.205,00, sedangkan kenaikan di sebelah kewajiban dan ekuitas disebabkan oleh kenaikan utang jangka pendek sebesar Rp 31.591.361.816.178,00, kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp 69.311.031.098.719,00 dan sisanya kenaikan ekuitas dana neto sebesar Rp 279.344.722.638.307,00.

Dari analisis current ratio pemerintah untuk tahun 2007 menunjukkan hasil 112% artinya setiap Rp 1 utang lancar pemerintah ditanggung oleh Rp 1,12 aktiva lancar. Sedangkan untuk tahun anggaran 2006 menunjukkan hasil 117%.. Untuk total utang terhadap total modal menunjukkan hasil 845% artinya setiap Rp 1 ekuitas dana pemerintah menanggung utang sebesar Rp 845. Jika dibandingkan dengan sektor swasta kondisi ini sudah bisa dikategorikan bangkrut. Kondisi tahun 2007 masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 karena perbandingannya -1208%.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2007), *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah (2002), *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002.*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
-, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2007, dalam *Harian Kompas* tanggal 16 Juli 2008
- Wild, John J., Subramanyam, K.R., and Halsey, Robert F.(2007), *Financial Statement Analysis*, Ninth Edition, McGraw-Hill International Edition.

I KETUT BUDIARTHA, dosen FE Unud yang pada tahun 2007 lalu baru menamatkan study S3-nya pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Selain sibuk mengajar dan aktif menjadi pimpinan/ketua pada beberapa lembaga, seperti: program Magister Akuntansi FE Unud, IAI Bali (sie Pendidikan), KAP Ketut Budiarta dan badan pengawas LPD desa adat Lambing, Sibang Kaja, ia masih tetap produktif dalam melakukan berbagai penelitian, terutama yang terkait dengan konsentrasi bidang ilmu yang ditekuninya, yakni akuntansi.

Telp: (+62)8123999575. Email: maksi.unud@yahoo.co.id

LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2007			THN ANGG. 2006
	ANGGARAN	REALISASI	%	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Penerimaan Perpajakan	492,010,893,000	490,988,634,954	99.79%	409,203,019,335
1. Pajak Dalam Negeri	474,550,950,000	470,051,815,733	99.05%	395,971,535,630
2. Pajak Perdagangan Internasional	17,459,943,000	20,936,819,221	119.91%	13,231,483,705
II Penerimaan Negara Bukan Pajak	198,253,670,829	215,119,705,409	108.51%	228,784,117,169
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	115,053,273,200	132,892,588,952	115.51%	167,473,800,945
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	21,800,000,000	23,222,505,531	106.53%	22,973,056,234
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	61,400,397,629	59,004,610,926	96.10%	36,503,209,205
III Penerimaan Hibah	3,823,317,683	1,697,747,939	44.41%	1,834,050,785
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I+A.II)	694,087,881,512	707,806,088,302	101.98%	637,987,136,504
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat	498,172,161,850	504,623,263,583	101.29%	440,032,083,567
1. Belanja pegawai	92,843,560,640	90,424,946,964	97.39%	73,252,287,265
2. Belanja barang	65,260,427,057	54,511,365,469	83.53%	47,181,912,659
3. Belanja Modal	75,050,813,170	64,288,669,050	85.66%	54,951,874,415
4. Pembayaran Bunga Utang	83,555,140,000	79,806,377,534	95.51%	79,082,563,276
5. Subsidi	105,073,369,472	150,214,443,691	142.96%	107,431,785,858
6. Bantuan Sosial	50,607,662,924	49,756,281,449	98.32%	40,708,566,188
7. Belanja lain-lain	25,781,186,587	15,621,179,426	60.59%	37,423,093,906
II Transfer untuk Daerah	254,201,014,938	253,263,178,085	99.63%	226,179,954,327
1. Dana Perimbangan	244,607,806,138	243,967,173,165	99.74%	222,130,617,896
a. Dana Bagi hasil	62,726,306,138	62,941,953,784	100.34%	64,900,298,776
b. Dana Alokasi Umum	164,787,400,000	164,787,399,928	100.00%	145,664,184,719
c. Dana Alokasi khusus	17,094,100,000	16,237,819,453	94.99%	11,566,134,401
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	9,593,208,800	9,296,004,920	96.90%	4,049,336,431
a. Dana Otonomi Khusus	4,045,748,000	4,045,748,000	100.00%	3,488,284,000
b. Dana Penyesuaian	5,547,460,800	5,250,256,920	94.64%	561,052,431
III Suspen		(236,528,782)		916,774,166
Jumlah Belanja Negara (B.I+B.II+B.III)	752,373,176,788	757,649,912,886	100.70%	667,128,812,060
C. Surplus (Deposit) Anggaran (A-B)	(58,285,295,276)	(49,843,824,584)	85.52%	(29,141,675,556)
D. Pembiayaan				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	70,825,681,176	66,308,947,651	93.62%	52,424,102,591
1.a. Rekening pemerintah	10,621,642,900	11,143,278,070	104.91%	18,912,866,605
b. Penerusan Pinjaman		(2,723,357,058)		(3,557,973,958)
2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	6,357,719,000	5,416,839,483	85.20%	5,055,702,597
3. Surat Utang Negara	58,546,319,276	57,172,187,156	97.65%	35,985,507,347
4. Penyertaan Modal Negara dan dukungan Infrastruktur	(4,700,000,000)	(4,700,000,000)	100.00%	(3,972,000,000)
II Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(12,540,385,900)	(23,852,411,835)	190.20%	(23,008,512,340)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	42,210,304,100	34,070,047,317	80.72%	29,672,559,197
a. Penarikan Pinjaman Program	19,005,000,000	19,607,480,189	103.17%	13,579,552,756
b. Penarikan Pinjaman Proyek	23,205,304,100	14,462,567,128	62.32%	16,093,006,441
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(54,750,690,000)	(57,922,459,152)	105.79%	(52,681,071,537)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)	58,285,295,276	42,456,535,816	72.84%	29,415,590,251
E. Sisa Lebih(Kurang) pembiayaan Anggaran SILPA(SIKPA) D+C)		(7,387,288,768)		273,914,695.00

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2007	TAHUN ANGGARAN 2006
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
I Arus Kas Masuk		
1 Penerimaan perpajakan		
a Pajak Penghasilan	238,430,926,067,905.00	208,833,125,652,841.00
b Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjl. Brg Mwh	154,526,773,832,995.00	123,035,859,568,711.00
c Pajak Bumi dan Bangunan	23,723,546,008,858.00	20,858,516,906,123.00
d Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	5,953,378,541,895.00	3,184,469,880,249.00
e Cukai	44,679,463,855,018.00	37,772,132,887,314.00
f Bea Masuk	16,699,443,059,175.00	12,140,401,555,427.00
g Pajak Ekspor	4,237,376,161,875.00	1,091,082,150,011.00
h Pajak Lainnya	2,737,727,426,269.00	2,287,430,734,714.00
Total Penerimaan Perpajakan	490,988,634,953,990.00	409,203,019,335,390.00
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
a Penerimaan Sumber Daya Alam	132,892,588,952,850.00	167,473,800,945,318.00
b Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	23,222,505,531,880.00	22,973,056,234,957.00
c Penerimaan BNPB Lainnya	58,922,417,177,557.00	36,467,597,306,379.00
Total PNBP	215,037,511,662,287.00	226,914,454,486,654.00
3 Penerimaan Hibah	1,697,747,939,503.00	1,834,050,785,735.00
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	707,723,894,555,780.00	637,951,524,607,779.00
II Arus Kas Keluar		
1 Belanja Pegawai	90,358,606,656,075.00	72,884,043,314,552.00
2 Belanja Barang	54,395,453,562,207.00	47,065,451,829,540.00
3 Bunga Utang	79,744,341,931,244.00	79,069,362,794,878.00
4 Subsidi	150,214,150,451,047.00	107,456,739,357,285.00
5 Bantuan Sosial	49,668,943,160,212.00	40,684,769,238,136.00
6 Belanja lain-lain	15,623,762,951,481.00	38,155,510,436,090.00
7 Bagi Hasil Pajak	34,990,350,498,937.00	28,544,231,692,934.00
8 Bagi Hasil SDA	27,951,938,003,404.00	36,700,805,029,998.00
9 Dana Alokasi Umum	164,808,765,128,352.00	145,666,815,317,795.00
10 Dana Alokasi Khusus	16,237,819,453,074.00	11,566,091,977,723.00
11 Dana Otonomi Khusus	4,058,348,000,000.00	3,488,284,000,000.00
12 Dana Penyesuaian	5,216,291,720,133.00	558,303,431,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	693,268,771,516,166.00	611,840,408,419,931.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	14,455,123,039,614.00	26,111,116,187,848.00
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
I Arus Kas Masuk		
Penjualan Aset Tetap	82,193,749,036.00	35,611,899,217.00
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	82,193,749,036.00	35,611,899,217.00
II Arus Kas Keluar		
Belanja Aset tetap	64,381,141,374,712.00	55,288,404,645,311.00
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	64,381,141,374,712.00	55,288,404,645,311.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan (B.I - B.II)	(64,298,947,625,676.00)	(55,252,792,746,094.00)
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
I Arus Kas Masuk		
1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	132,927,083,411,932.00	118,203,381,971,024.00
2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	34,070,047,317,686.00	29,672,559,197,871.00
3 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	9,261,378,112,144.00	3,665,247.00
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	176,258,508,841,762.00	147,875,944,834,142.00
II Arus Kas Keluar		
1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	59,686,063,547,598.00	58,249,309,085,493.00
2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	57,922,459,152,174.00	52,681,071,537,783.00
3 Penyertaan Modal Negara dan Dukunga Infrastruktur	4,700,000,000,000.00	3,972,000,000,000.00
4 RDI-RPD	2,723,357,058,788.00	3,557,973,958,998.00
5 Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	8,770,093,285,433.00	-
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	133,801,973,043,993.00	118,460,354,582,274.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I - C.II)	42,456,535,797,769.00	29,415,590,251,868.00

D	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
1	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	231,158,227,155.00	184,359,625,705.00
2	Transfer Antar Kantor	5,760,832,890,959.00	3,033,686,327,758.00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas non Anggaran (D.I - D.II)	5,991,991,118,114.00	3,218,045,953,463.00
	Kenaikan (penurunan) Kas (A+B+C+D)	(1,395,297,670,179.00)	3,491,959,647,085.00
	Saldo Awal Kas BUN dan KPPN	21,548,929,469,290.00	18,056,969,822,145.00
	Penambahan Saldo Awal:		
		3,806,594,579,799.00	
		102,188,801,037.00	
	Saldo Awal Kas BUN & KPPN dan Kas BLU Setelah Penambahan	25,457,712,850,126.00	18,056,969,822,145.00
	Saldo Akhir Kas BUN & KPPN dan Kas BLU	24,062,415,000,056.00	21,548,929,469,290.00
	Rekening Pemerintah lainnya Pada BI	3,248,408,392,480.00	12,331,109,271,481.00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,245,221,273,097.00	1,457,362,551,679.00
	Kas di Bendahara Penerimaan	878,054,836,115.00	429,469,122,788.00
	Kas Trust Fund		2,425,944,284,122.00
	SALDO AKHIR KAS DAN BANK	29,434,099,501,748.00	38,192,814,699,360.00

**NERACA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(DALAM RUPIAH)**

URAIAN	31 DESEMBER 2007	31 DESEMBER 2006
Kas dan Bank		
Rekening kas BUN di BI	18,170,046,148,742.00	954,310,836,789.00
Rekening kas di KPPN	5,492,896,654,079.00	20,594,618,632,501.00
Rekening Pemerintah lainnya di BI	3,248,408,392,480.00	12,331,109,271,481.00
Kas di bendahara Pengeluaran	1,245,221,273,097.00	1,457,362,551,679.00
Kas di Bendahara Penerimaan	878,054,836,115.00	429,489,122,788.00
Kas di BLU	444,767,605,022.00	
Kas Trust Fund	-	2,425,944,284,122.00
Jumlah Kas dan Bank	29,479,394,909,535.00	38,192,834,699,360.00
Uang Muka dari rekening BUN	3,405,421,282,834.00	2,764,674,545,037.00
Piutang		
Piutang Pajak	42,042,099,564,945.00	35,454,552,126,836.00
Piutang Bukan Pajak	38,045,969,394,145.00	25,737,724,557,593.00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	82,112,146.00	90,560,467.00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	4,229,682,020.00	12,153,879,936.00
Bagian Lancar RDI/RPD	23,180,947,180,000.00	
Belanja Dibayar Dimuka	1,322,504,162,418.00	597,914,389,211.00
Piutang Lain-lain	12,321,167,839,147.00	19,688,724,084,329.00
Jumlah Piutang	116,916,999,934,821.00	81,491,159,598,372.00
Persediaan	6,797,911,546,822.00	3,536,487,866,859.00
Jumlah Aset Lancar	156,599,727,674,012.00	125,985,156,709,628.00
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen		
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	39,533,081,330,000.00	59,212,080,140,000.00
Dana Bergulir	6,915,945,297,699.00	5,690,613,254,758.00
Investasi Non Permanen Lainnya	6,916,259,685,177.00	2,750,000,000,000.00
Jumlah Investasi Non Permanen	53,365,286,312,876.00	67,652,693,394,758.00
Investasi Permanen		
Investasi Permanen PNM	496,606,812,461,827.00	475,737,070,434,585.00
Investasi Permanen Lainnya	141,370,363,451,861.00	120,161,338,331,481.00
Jumlah Investasi Permanen	637,977,175,913,688.00	595,898,408,766,066.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	691,342,462,226,564.00	663,551,102,160,824.00
Aset Tetap		
Tanah	126,356,123,950,050.00	81,443,273,004,883.00
Peralatan dan Mesin	128,364,176,462,694.00	111,945,481,046,323.00
Gedung dan Bangunan	74,830,730,558,020.00	53,225,867,742,893.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	94,082,094,925,843.00	82,173,661,040,323.00

Aset Tetap Lainnya	6,056,479,440,047.00	4,101,873,511,741.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13,796,365,616,075.00	11,034,797,470,188.00
Jumlah Aset Tetap	443,485,970,952,729.00	343,924,953,816,351.00
Aset Lainnya		
Tagihan Penjualan Angsuran	264,984,954.00	140,032,475.00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	30,048,960,054.00	51,048,922,086.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	501,250,000.00	33,569,000.00
Aset Tak Berwujud	1,899,119,911,980.00	569,719,157,703.00
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	21,431,360,880,137.00	29,533,267,302,742.00
Aset Lain-Lain	285,422,216,024,595.00	56,349,135,641,011.00
Jumlah Aset Lainnya	308,783,512,011,720.00	86,503,344,625,017.00
JUMLAH ASET	1,600,211,672,865,020.00	1,219,964,557,311,820.00
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	525,494,606,202.00	460,693,623,955.00
Bagian Lancar Utang Jangka panjang tang Bunga	96,214,976,565,544.00	79,760,070,578,171.00
Utang Kepada Pihak Ketiga	15,168,399,409,074.00	13,307,756,263,984.00
Utang jangka Pendek lainnya	25,063,414,380,587.00	11,668,015,966,779.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2,760,047,411,652.00	2,944,434,123,992.00
139,732,332,373,059.00	108,140,970,556,881.00	
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang dalam Negeri		
Utang Jangka Panjang dalam Negeri SUN	693,789,445,220,648.00	664,069,038,386,125.00
Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT	1,754,377,650,427.00	1,646,697,846,635.00
Jumlah Utang Jangka Panjang Dlm. Negeri	695,543,822,871,075.00	665,715,736,232,760.00
Utang Jangka Panjang Luar Negeri		
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	528,644,752,378,689.00	505,104,096,673,440.00
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	14,808,032,952.00	130,873,212,300.00
Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN	66,559,215,313,000.00	50,456,525,092,318.00
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	470,533,090,781.00	514,869,376,960.00
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	595,689,308,815,422.00	556,206,364,355,018.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1,291,233,131,686,400.00	1,221,922,100,587,780.00
Jumlah Kewajiban	1,430,965,464,059,560.00	1,330,063,071,144,660.00
Ekuitas Dana		
Ekuitas Dana Lancar		
SAL	18,830,302,308,895.00	17,066,126,565,213.00
SILPA(SIKPA)	(7,387,288,768,184.00)	273,913,693,682.00
Dana Lancar Lainnya	19,584,010,680,384.00	22,727,286,238,759.00
Cadangan Piutang	108,296,689,599,084.00	81,491,159,598,372.00
Cadangan Persediaan	6,797,911,546,822.00	3,536,487,866,859.00
Pendapatan yang Ditangguhkan	9,952,607,700,809.00	429,489,122,788.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		
Utang Jangka Pendek	(139,206,837,766,857.00)	(107,680,276,932,926.00)
Selisih Kurs	(47,657,062,985,254.00)	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	(30,789,667,684,301.00)	17,844,186,152,747.00
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	691,342,462,226,564.00	663,551,102,160,825.00
Diinvestasikan dalam dalam Aset Tetap	443,485,970,952,729.00	343,924,953,816,351.00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	308,783,512,011,720.00	86,503,344,625,017.00
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang		
Jangka Panjang	(1,243,576,068,701,240.00)	(1,221,922,100,587,770.00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasikan	200,035,876,489,773.00	(127,942,699,985,577.00)
Ekuitas Dana Neto	169,246,208,805,469.00	(110,098,513,832,838.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,600,211,672,865,020.00	1,219,964,557,311,820.00